

## **QUO VADIS PENGAJARAN BAHASA ASING DI SMA ?**

Oleh : Dadang Sunendar

Keberadaan bahasa asing selain bahasa Inggris di Indonesia apabila melihat hitungan tahun sudah cukup lama. Mulai dari era kolonialisasi Belanda yang panjang hingga zaman Jepang yang relatif pendek. Bahasa Belanda dan Jepang pada masa itu diajarkan, meskipun dalam lingkungan terbatas.

Hasilnya, seperti kita ketahui bersama, Indonesia yang masyarakat pada umumnya dwibahasawan tidak menjadi negara penutur bahasa Belanda. Sebagai ilustrasi kita dapat menunjuk tigaperempat wilayah Afrika yang merupakan negara-negara frankofon (negara penutur bahasa Prancis) sebagai peninggalan kolonialisme Prancis di Afrika, seperti Mesir, Tunisia, Chad, Pantai Gading, Maroko, Aljazair, Kamerun, Gabon, Burundi, Togo, Ghana, dan di beberapa belahan dunia lainnya yang termasuk pada departemen dan teritori Prancis jauh atau DOM-TOM (*Département d'Outre-Mer* dan *Territoire d'Outre-Mer*). Ilustrasi lain yang kita kenali bersama adalah penutur anglofon (penutur bahasa Inggris) yang tersebar di lima benua. Contoh lain yang masih relevan untuk disebutkan di sini adalah hadirnya para penutur bahasa Spanyol (hispanofon) dan bahasa Portugal di belahan benua Amerika. Tentu bukan pada tempatnya kita mempertanyakan mengapa Bahasa Belanda atau bahasa Jepang tidak menjadi bahasa kedua atau ketiga di bumi ini. Sebaliknya, kita bersyukur memiliki bahasa Indonesia yang menjadi bahasa pemersatu, bahasa yang dewasa ini termasuk pada barisan kelompok bahasa dengan penutur terbesar di dunia. Meskipun pada kenyataannya belum seluruh rakyat Indonesia adalah penutur bahasa Indonesia.

Sejarah panjang pengajaran bahasa asing di Indonesia berlangsung sampai saat ini. Bahkan dalam rancangan kurikulum terbaru, yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) di SMU, bahasa Prancis, Jepang, Jerman, Arab, dan yang baru, bahasa Mandarin, merupakan bahasa asing yang dipelajari. Secara umum perubahan substansial tidaklah begitu tampak dalam KBK tersebut dibandingkan dengan kurikulum yang berlaku sebelumnya, baik dalam pengorganisasian alokasi waktu maupun tujuan-tujuan yang ingin dicapainya, namun yang lebih penting dari itu semua, alangkah baiknya apabila kita

memberi perhatian pada 'semangat' menghadirkan bahasa asing di sekolah menengah tersebut.

Semangat tersebut harus ditangkap sebagai manifestasi kepedulian pemerintah terhadap perkembangan hubungan dunia internasional. Arahnya memang tidak sepenuhnya seperti keberadaan bahasa Inggris di mancanegara, namun sekurang-kurangnya mampu memberikan makna dan ruang yang luas pada berbagai level hubungan dan aktivitas non anglofon. Hal tersebut sejalan dengan semakin meningkatnya investasi negara-negara non anglofon di Indonesia, baik dalam bidang teknologi, ekonomi, maupun budaya. Sebagai contoh, ekspor Prancis ke Indonesia dalam dua tahun terakhir kembali meningkat; 17% pada tahun 2000 dan 28% untuk tahun 2001 hingga mencapai 495 juta euro. Tingkat kenaikan itu jauh lebih tinggi daripada tingkat kenaikan yang tercatat di pasar-pasar ASEAN lainnya, namun masih jauh dibandingkan dengan rata-rata sebelum krisis yang mencapai 854 juta euro per tahun, bahkan tahun 1997 mencapai rekor sebesar 1,3 miliar euro berkat penjualan 4 buah pesawat terbang Airbus (Data : *Agenda de l'Ambassade de France en Indonésie*, 2003 : 41-42).

Pertumbuhan investasi atau kerjasama ekonomi antarnegara memang tidak merepresentasikan jumlah penutur bahasa dari negara tersebut. Namun, setidaknya memberikan indikasi adanya lapangan pekerjaan, multiaktivitas di beberapa negara sahabat yang non anglofon, dan untuk alasan itu pulalah bahasa asing hadir.

Pengajaran bahasa asing di sekolah menengah diarahkan pada penguasaan dasar bahasa sasaran. Tujuan-tujuan yang sebenarnya telah berulang kali dicantumkan dalam kurikulum yang berlaku sekarang maupun yang terdahulu. Namun, pencantuman tujuan-tujuan pengajarannya masih terasa mengambang dan kurang tajam. Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) sering muncul hanya secara seremonial dan normatif. Pada awalnya disinyalir bahwa permasalahan tersebut muncul karena kekurangtepatan para penyusun materi bahan ajar membuat perencanaan pengajaran; seleksi, gradasi, dan evaluasi pada akhirnya ikut pula dipertanyakan, para pengajar bahasa asing lain menunjuk pada ketidaktepatan dan ketidaksesuaian buku paket yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Depdiknas) dengan GBPP. Hasilnya, yang terjadi di lapangan, menurut hasil observasi, para guru sekolah menengah banyak mengabaikan GBPP yang telah digariskan. Mereka berinisiatif untuk mengelola materi

bahan ajar sesuai dengan kemampuan mereka dan kondisi lapangan. Mereka berkilah bahwa penyusun kurikulum kurang memahami realitas yang ada pada diri pembelajar dan pengajar. Realitas lain yang mereka pertanyakan adalah alokasi waktu yang dirasakan tidak mencukupi untuk mencapai tujuan-tujuan ambisius kurikulum.

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang masih dalam proses sosialisasi diharapkan membawa beberapa perubahan krusial agar mampu atau setidaknya mengurangi kekurangan yang ada. Sosialisasi KBK yang dilakukan Pusat Kurikulum (Puskur) merupakan langkah yang perlu mendapat dukungan dari semua pihak, terutama mereka yang berada di luar Jakarta, meskipun di tengah isu munculnya dua versi KBK yang pernah merebak.

Bertemali dengan rencana pemberlakuan KBK, tampaknya akan lebih baik lagi apabila para penyusun awal rancangan kurikulum tersebut terdiri dari semua unsur yang terkait, atau setidaknya mewakili mereka, seperti para pengajar di SMA, pengajar di perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi yang memiliki basis kuat dalam bidang pendidikan seperti Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Negeri Jakarta, UNY, UNM, dan lain-lain. Pihak lain yang dapat diminta urun-rembuk dalam pengajaran bahasa asing adalah asosiasi-asosiasi profesi seperti Perhimpunan Pengajar Bahasa Prancis Seluruh Indonesia (PPPSI) untuk bidang bahasa Prancis, Perhimpunan Pengajar Bahasa Jepang untuk bahasa Jepang, dan lain-lain, karena mereka mengetahui berbagai permasalahan yang berkembang dari para pengajar yang menjadi anggotanya melalui pertemuan-pertemuan rutin asosiasi. PPPG Bahasa di Jakarta pun seharusnya diberi peran lebih besar untuk memberikan masukan kepada Pusat Kurikulum dalam memecahkan beberapa permasalahan di atas, di samping peran MGMP di setiap wilayah.

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) sebagai penanggung jawab pengajaran bahasa asing tampaknya harus bertindak sebagai koordinator yang baik untuk mengumpulkan semua masukan. Diperlukan kejelasan tugas dan wewenang yang lebih lugas dan rinci untuk operasional di lapangan, terutama kejelasan bagi para pengajar dalam melaksanakan tugasnya. Sekarang ini terkesan masing-masing pihak merasa mendapat masukan langsung dari guru, namun tanpa tindak lanjut.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dinamika perkembangan pengajaran bahasa asing di Indonesia banyak pula ditentukan oleh bantuan finansial yang diberikan oleh kedutaan-kedutaan negara asing melalui atase budaya atau atase bahasa mereka. Sebagai contoh, bahasa Jepang memiliki dukungan yang baik dari *Japan Fondation*, bahasa Prancis memperoleh dukungan dari SCAC (*Service de Coopération et d'Action Culturelle*), demikian pula dengan bahasa asing yang lainnya. Dalam kaitan kerjasama tersebut pihak luar dapat diminta berbagai pertimbangannya, terutama yang berkaitan dengan dana maupun relevansi program yang dibiayainya.

Semakin maraknya pengajaran bahasa asing dewasa ini, terutama di tingkat perguruan tinggi, mungkin menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk memperkuat pendidikan bahasa asing di Indonesia. Momentum ini hendaknya digunakan pula untuk memperkenalkan bahasa asing secara lebih baik melalui KBK pada tingkat sekolah menengah. Sebagai contoh, kehadiran pusat-pusat kebudayaan asing di Indonesia tampaknya masih belum dipahami fungsinya oleh pemerintah. Masing-masing berjalan sendiri, tanpa koordinasi. Padahal, apabila pemerintah (daerah) mampu memanfaatkan keberadaan pusat kebudayaan asing, hal itu secara langsung akan memberi efek kerjasama yang lebih luas cakupannya, termasuk kerjasama dalam pengembangan bahasa asing, sehingga pembelajar bahasa asing tidak akan bertanya : *Quo vadis* pengajaran bahasa asing di SMA ?